

**COLLABORATIVE GOVERNANCE SEBAGAI LANGKAH PENGEMBANGAN
PARIWISATA DI KABUPATEN PESISIR BARAT (STUDI KASUS EKOWISATA
BAHARI DI PULAU PISANG)**

Devi Meri Yanti

Email : devimnur08@gmail.com

Dr. Dra. Kushandajani, M.Si

Email : kushandajani@lecturer.undip.ac.id

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Website : <https://fisip.undip.com> – Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas mengenai collaborative governance sebagai langkah pengembangan pariwisata di kabupaten Pesisir Barat. Tujuan penelitian yaitu untuk memberikan desain baru dalam proses pengembangan pariwisata yaitu menggunakan desain kolaborasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara kepada satu pegawai Dinas Pariwisata, dua masyarakat Pulau Pisang (pengrajin tapis), satu sektor swasta yaitu pemilik café Malika dikawasan wisata. Analisis data yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desain baru yaitu collaborative governance untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat masih belum sepenuhnya berhasil diterapkan yaitu dari delapan kriteria keberhasilan kolaborasi. Terdapat tiga kriteria yang sudah diterapkan oleh pemerintah dalam proses pengembangan pariwisata yaitu *governance, access to authority, information sharing*.

Kata Kunci : Collaborative Governance, Proses Pengembangan, dan Pariwisata.

***COLLABORATIVE GOVERNANCE AS A STEPS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN
PESISIR BARAT REGENCY (CASE STUDY OF MARINE ECOTOURISM ON
BANANA ISLAND)***

Devi Meri Yanti

Email : devimnur08@gmail.com

Dr. Dra. Kushandajani, M.Si

Email : kushandajani@lecturer.undip.ac.id

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Website : <https://fisip.undip.com> – Email : fisip@undip.ac.id

ABSTACT

This research is a research that discusses collaborative governance as a step for tourism development in the Pesisir Barat district. The purpose of the research is to provide a new design in the tourism development process, namely using a collaborative design.

This study uses descriptive qualitative research methods. Data collection through interviews with one tourism office employee, two Banana Island communities (filter craftsmen), one private sector namely the owner of café Malika in the tourist area. Data analysis by reducing data, presenting data, and drawing conclusions.

The result of this study indicate that the new design of collaborative governance for tourism development in the West Coast District has not yet fully implemented the criteria for collaboration success. There are three criteria that have been applied by the government in the tourism development process, namely *governance, access to authority, information sharing*.

Keywords : Collaborative Governance, Development Process, and Tourism.

A. PENDAHULUAN

Salah satu sektor unggulan sebagai penopang pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yaitu sektor pariwisata (tourism leading sector)¹. Hal ini memperkuat pernyataan bahwa sebagai negara kepulauan dan negara maritim Indonesia memiliki kekuatan besar dalam menopang kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata. Untuk memperkuat kekuatan Indonesia sebagai salah satu poros maritim dunia dapat diwujudkan melalui sektor pariwisata².

Indonesia memiliki banyak daerah pesisir dan dikaruniai keindahan pesona laut, salah satunya yaitu Kabupaten Pesisir Barat yang berdiri pada 23 April 2012. Keindahan alam yang disuguhi oleh Pesisir Barat berupa

hamparan laut sepanjang 210km, ombak setinggi 7m di Pantai Tanjung Setia yang sudah diadakan turnamen surfing tingkat dunia (Word Surfing Leage) yang menyebabkan kunjungan wisatawan pada 2017 sebesar 15 ribu menjadi 110 ribu pada tahun 2018.

Sebagai daerah pesisir Kabupaten Pesisir Barat memiliki beberapa wisata unggulan dan sudah dikenal oleh wisatawan lokal maupun mancanegara, salah satunya yaitu Pulau Pisang. Salah satu kecamatan yang berbentuk pulau, Pulau Pisang merupakan salah satu destinasi wisata yang memiliki keindahan alam berupa lautan, pasir putih yang masih bersih, keindahan alam bawah laut yang dapat dijadikan tempat untuk diving dan snorkeling³. Selain itu, pada kesempatan terbaik

¹ Nasution, R. H., Avenzora, R., & Sunarminto, T. (2018). The Analysis of Ecotourism Laws and Policies in Indonesia. *Media Konservasi*, 23(1), 9–17. <https://doi.org/10.29243/medkon.23.1.9-17>

² Ferdian, K. J., DM, I. A. I., & Tondo, S. (2019). Dampak Ekowisata Bahari Dalam Perspektif Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan Pesisir. *Journal of Indonesian Public Administration and*

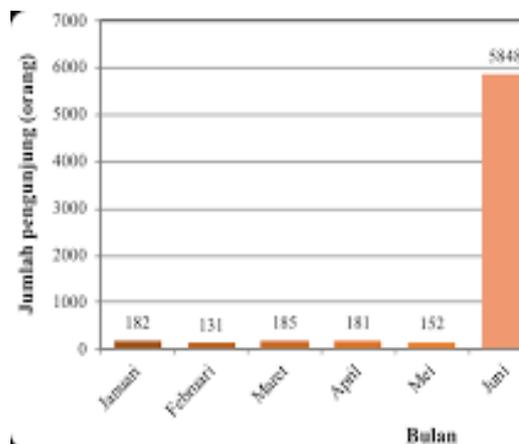
Governance Studies (JIPAGS), 3(1).

³ Lazuardi, I., Subardjo, P., & Hariyadi. (2013). Analisis Kesesuaian Perairan Untuk Wisata Snorkeling dan Diving Di Pulau Pisang Bagian Utara Kecamatan Pesisir Utara Lampung Barat. *Journal Of Marine Research*, 2(3).

penyebrangan, wisatawan dapat menjumpai paus ditengah lautan yang menambah pesona Pulau Pisang.

Wisatawan yang berkunjung setiap bulan ke Pulau Pisang kadang mengalami kenaikan, kadang menurun, dan stabil. Sepanjang tahun 2018 wisatawan yang berkunjung ke Pulau Pisang mengalami kenaikan, penurunan dan stabil tergantung pada cuaca, dan event wisata yang dilaksanakan di Pulau Pisang (Badan Pusat Statistik Lampung Barat)⁴.

Gambar 1.1 Jumlah pengunjung bulan Januari – September 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik Lampung Barat 2018

Terlihat pada tabel bahwa pada bulan Januari hingga Mei jumlah wisatawan cenderung stabil di sekitar 100 orang, kemudian mengalami lonjakan wisatawan pada Bulan Juni yaitu sebesar 5 ribu wisatawan yang disebabkan karena pada bulan Juni merupakan Hari Raya Idul Fitri dan terdapat pertunjukan sekugha di Pulau Pisang, penurunan yang cukup drastis pada bulan Juli yaitu hanya 35 orang dikarenakan pada bulan Juli cuaca tidak mendukung, dan pada bulan Agustus hingga September kunjungan wisatawan ke Pulau Pisang cenderung stabil dengan 100 orang lebih.

Sebagai salah satu wisata unggulan Pulau Pisang masih harus dikembangkan sebaik mungkin untuk menarik minat wisatawan, baik berupa perbaikan infrastruktur berupa dermaga, transportasi, dan juga infrastruktur yang mendukung lokasi wisata. Hal inilah yang kemudian mengharuskan campur tangan pihak lain selain pemerintah untuk mempercepat laju pengembangan dan pembangunan

⁴ Sofiyani, A., Winarno, G. D., & Hidayat, W. (2019).

Analisis Daya Dukung Fisik, Riil dan Efektif Ekowisata di Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir

Pulau Pisang sebagai destinasi wisata unggulan. Pihak-pihak lain yang diharapkan yaitu swasta sebagai investor dan masyarakat sebagai pemilik destinasi. Ketiga elemen inilah yang dibutuhkan kolaborasinya dan memiliki peran masing-masing untuk pengembangan pariwisata. Hal yang dimaksud yaitu *collaborative governance* merupakan upaya kerjasama yang kolaboratif antar pihak yang intensif dan pihak-pihak yang terlibat memiliki *elighment* dalam tujuan, strategi, agenda, sumber daya, dan aktivitas⁵.

Namun hingga sejauh ini ketiga aktor tidak kunjung bersatu lantaran :

1. Karena ketertinggalan masyarakat pulau pisang terhadap perkembangan zaman sehingga mereka belum mampu berpikir secara terbuka karena sudah nyaman dengan gaya hidup yang mereka jalani selama ini.
2. Pemerintah yang belum maksimal dalam memberikan penjelasan mengenai potensi

pulau pisang kepada masyarakat dan tidak memberikan solusi serta jaminan terhadap ketakutan masyarakat sehingga masyarakat tetap pada zona nyaman mereka.

3. Swasta tidak menjadi faktor penggerak yang dapat menjadi motor agar adanya dorongan atau keinginan dari masyarakat untuk membuka diri terhadap potensi wisata yang daerah mereka miliki.

Collaborative governance dapat menjadi desain baru dan langkah terbaik untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat dan pengembangan ekowisata bahari di pulau pisang karena pemerintah daerah tidak mempunyai cukup sumber daya untuk membangun infrastruktur dan fasilitas, kemudian juga pasifnya partisipasi masyarakat pulau pisang. Dalam hal ini, permasalahan bukan hanya harus diselesaikan oleh pemerintah daerah tetapi juga harus melibatkan pihak swasta dan juga keterlibatan

⁵ Diani, R. M., & Simbolon, Y. K. G. (2017). Analisis Penerapan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Bencana Lava Tour. *Forum*

masyarakat dalam pengembangan ekowisata bahari di pulau pisang.

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini yaitu Penulis mencoba untuk melihat dari kacamata *Collaborative Governance* tentang pengelolaan dan pengembangan Ekowisata Bahari di pulau pisang.

C. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

1. *Governance*

World Bank mengartikan *governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development society*” yang berarti cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. Dari penjelasan World Bank tentang *governance* dapat disimpulkan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh negara merupakan kunci

utama dalam pembangunan masyarakat.

UNDP memberikan pengertian tentang *governance* yaitu “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation affair at all levels*” dapat diartikan sebagai penggunaan atau pelaksanaan, yakni penggunaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan⁶.

Governance atau pemerintahan menunjukkan aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik⁷. Diartikan bahwa *governance* atau pemerintahan tidak hanya merujuk pada pemerintah itu saja, tetapi lebih kompleks dengan aktivitas kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, mengatur segala hal yang berkaitan dengan ranah publik yaitu kepentingan warga negara,

⁶ Manaf, A. (2016). Good Governance dan Pelayanan Publik. *Modul Materi Good Governance Dan Pelayanan Publik*, 1, 58.
<https://aclc.kpk.go.id/wp->

<content/uploads/2019/07/Modul-good-governance-aclc-kpk.pdf>

⁷ Labolo, M. (2005). *Memahami Ilmu Pemerintahan* (ke 2). PT RajaGrafindo Persada.

pemilik suara, dan juga para pekerja.

Terdapat 3 bagian dari *governance*, Ketiga bagian dari *governance* tersebut memiliki fungsi dan peran masing-masing, yaitu⁸ :

- a. *Public sector* (pemerintah), ruang dimana publik memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengatur tata kehidupan bersama dengan kepemilikan kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang biasanya mandat tersebut dimiliki melalui proses pemilu, undang-undang, dan sistem birokrasi. Termasuk dalam sektor pemerintah yaitu presiden, parlemen, menteri, gubernur, bupati/walikota, dan instansi birokrasi.
- b. *Private sector* (swasta), ruang dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan serta tujuan mereka secara pribadi yang bergantung pada kekuatan ekonomi

untuk memperoleh *profit* sehingga dipengaruhi oleh adanya perhitungan ekonomi dengan hukum penawaran dan permintaan (*supply and demand*). Termasuk dalam sektor swasta yaitu perusahaan swasta, pengusaha kecil, profesional/pelaku bisnis individual.

- c. *Community sector* (masyarakat sukarela), ruang dimana masyarakat bergerak tanpa motivasi yang berkaitan dengan ekonomi atau kekuasaan. Dalam artian lain bahwa masyarakat adalah pihak yang akan turut berpartisipasi dalam lingkup dua sektor (pemerintah dan swasta) yang akan berinteraksi dan menjalin relasi karena ketiganya saling membutuhkan.

2. *Collaborative Governance*

Collaborative governance dapat diartikan sebagai sebuah proses

⁸ Setiyono, B. (2014). *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik* (ke 1). CAPS.

yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor *governance* agar tujuan-tujuan positif dari masing-masing pihak dapat tercapai. Terdapat 3 fase atau tahapan dalam proses *collaborative governance*, yaitu⁹:

a. *Identifying Obstacles and Opportunities* (Fase Mendengarkan)

Tahap dimana pemerintah dan *stakeholders* akan melakukan identifikasi mengenai apa saja hambatan selama proses tatakelola pemerintahan. Pada tahap ini *stakeholders* menerangkan mengenai permasalahan dan *stakeholders* lainnya mendengarkan.

b. *Debating Strategies For Influence* (Fase Dialog)

Fase dialog merupakan lanjutan dari fase mendengarkan dimana pada fase ini para pemangku kepentingan

dan *stakeholders* melakukan dialog untuk mendiskusikan

hambatan yang diterangkan pada fase pertama. Mendiskusikan langkah paling efektif untuk memecahkan permasalahan tersebut.

c. *Planning Collaborative Actions* (Fase Pilihan)

Setelah melakukan tahap menerangkan dan mendengarkan

permasalahan yang dihadapi, kemudian dilanjutkan dengan tahap mendiskusikan strategi untuk memecahkan

permasalahan tersebut, maka sampailah pada tahap ketiga yaitu tahap dimana *stakeholders* atau pemangku kepentingan yang terlibat mulai menyusun perencanaan mengenai implementasi dari setiap strategi yang telah

⁹ Irawan, D. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya

). IR-Perpustakaan Universitas Airlangga, 5, 1–12.

ditentukan dan menjaga proses kolaborasi agar berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.

Selain itu, dalam *collaborative governance* terdapat 8 kriteria keberhasilan yaitu¹⁰ :

1. *Networked Structure*

Keterkaitan elemen satu dengan yang lainnya yang sama-sama menonjolkan unsur fisik dari jaringan yang ditangani dan tidak boleh menciptakan hirarki kekuasaan dari salah satu pihak yang ikut dalam kolaborasi.

2. *Commitment to a Common Purpose*

Jaringan yang terbentuk harus memiliki komitmen terhadap tujuan-tujuan dari organisasi dan tidak boleh memihak salah satu pihak yang ada dalam kolaborasi, tetapi harus berdasarkan

komitmen untuk mencapai tujuan bersama.

3. *Trust Among The Participants*

Setiap *stakeholders* harus saling percaya sebagai wujud dari hubungan profesional yang terjalin untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pemerintahan kolaboratif.

4. *Governance*

Merupakan hubungan saling percaya antara para aktor dalam pemerintahan. Tatakelola dapat dikatakan *governance* apabila dapat dipisahkan mana pihak yang terlibat dan mana pihak yang tidak terlibat.

5. *Access to Authority*

Aturan yang mengatur setiap kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholders* agar bisa menjalankan perannya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

6. *Distributive Accountability / Responsibility*

¹⁰ Irawan, D. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya

). IR-Perpustakaan Universitas Airlangga, 5, 1–12.

Pembagian tanggungjawab yang jelas, dan masing-masing *stakeholders* (termasuk masyarakat) harus terlibat dalam pembuatan keputusan.

7. *Information Sharing*

Harus ada pembagian informasi yang jelas dan masing-masing *stakeholders* harus diberi kemudahan dalam akses informasi.

8. *Access to Resources*

Harus ada kejelasan dan ketersediaan sumber daya bagi setiap *stakeholders* yang terlibat dalam kolaborasi tersebut.

D. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hal ini dapat menggunakan tipe deskriptif untuk pendekatan dalam penelitian yang digunakan untuk menjabarkan dan mempelajari mengenai bagaimana hubungan yang terjalin, sikap, kegiatan, serta proses yang berlangsung dan pengaruh yang terjadi pada *collaborative governance* untuk pengembangan

pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat.

Teknik untuk mengumpulkan data yaitu dengan wawancara yang mendalam dan secara langsung dengan narasumber dan studi dokumentasi yang di peroleh peneliti.

E. HASIL PENELITIAN

Kriteria keberhasilan *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat

1. *Network Structure*

Kriteria pertama yaitu *network structure* atau pembentukan jaringan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat sejauh ini belum pernah terlaksana. Hal ini dikarenakan pembentukan jaringan yang dilakukan pemerintah baik kepada swasta atau pelaku usaha dan kepada masyarakat hanya bersifat sementara dan tidak tetap yang hanya dilaksanakan apabila ada kegiatan mendesak untuk didiskusikan dan sesuai aturan seperti dilaksanakan satu tahun satu kali. Padahal, dalam *network structure* seharusnya terdapat kegiatan yang

dilaksanakan secara rutin dan terus menerus atau sebuah organisasi yang terus berkegiatan. Sejauh ini dalam proses pengembangan pariwisata pemerintah hanya melakukan Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrembang) yang diadakan satu tahun sekali.

2. *Commitment to a Common Purpose*

Setelah dilakukan pembentukan jaringan maka kriteria kedua yaitu setiap elemen harus berkomitmen terhadap tujuan yang hendak dicapai. Dalam kriteria kedua ini, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat memiliki komitmen yang tinggi dalam proses pengembangan pariwisata.

Dinas Pariwisata yang bertanggungjawab pada bagian pariwisata telah mengundang elemen-elemen terkait untuk bermusyawarah secara resmi dalam penataan kawasan wisata Labuhan Jukung. Elemen terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas

Koperasi, Perdagangan & UMKM, Pedagang Labuhan Jukung, Polsek Pesisir Tengah, Danramil, dan Media. Pengelola dalam hal ini dinas pariwisata adalah pihak pengundang yang mengerti dan berusaha mengedukasi pedagang dan pihak terkait lainnya untuk pengelolaan labuhan jukung yang lebih baik.

Komitmen lain yang sudah dipenuhi oleh pemerintah yaitu dengan mencari investor melalui kegiatan pameran diluar daerah seperti Pekan Raya Lampung yang diselenggarakan pada tahun 2019 dengan mengusung potensi yang ada di Pesisir Barat seperti kain tapis, repong damar, dan tentunya potensi pariwisata.

3. *Trust Among The Participants*

Setelah melewati fase berkomitmen terhadap tujuan maka kriteria selanjutnya yaitu rasa saling percaya antar elemen atau *stakeholders* yang terlibat dan akan terlibat dalam proses kolaborasi. Dalam kriteria ini, sejauh pengembangan pariwisata pemerintah menekankan bahwa rasa saling

percaya sudah ada dalam diri masing-masing elemen dimana pemerintah mempercayai keberadaan swasta dan kontribusinya kepada investasi. Begitupun pemerintah untuk membuat swasta mempercayai setiap kebijakan pemerintah salah satunya yaitu dengan penundaan kenaikan PBB apabila swasta tidak menyetujui hal tersebut.

4. Governance

Dalam proses kolaborasi harus ada pemisahan antar elemen yang wajib terlibat dan elemen pendukung kolaborasi. Jika elemen yang harus wajib ada yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat maka elemen tambahan bisa dari bidang akademisi atau media. Proses pengembangan pariwisata yang sudah ada di Pesisir Barat menunjukkan bahwa terdapat elemen lain yang masuk yaitu pihak media yang sudah bekerjasama dengan pemerintah sejak tahun 2016 dan bekerjasama pada bidang promosi pariwisata yang menyeluruh di setiap platform

media baik cetak, elektronik, maupun media sosial.

5. Access to Authority

Akses terhadap kekuasaan yang berarti bahwa setiap elemen memiliki hak yang sama terhadap akses kekuasaan yang ada. Pemerintah memberikan akses seluas mungkin kepada swasta dan masyarakat jika terdapat keluhan terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah. Salah satunya yaitu dapat menyampaikan keluhan melalui

<https://pesisirbaratkab.go.id>

dan

<https://disparpesisirbaratkab.go.id>.

Formulir Pengaduan ke Pemerintah Daerah Kabupaten (SILAPOR)

Sumber :
<https://pesisirbaratkab.go.id/lapor>

Tata cara pengaduan ke website pemerintah daerah kabupaten :

1. Masuk ke website <https://pesisirbaratkab.go.id/lapor>
2. Mengisi Nama Lengkap Pelapor
3. Mengisi Nomor Identitas Pelapor
4. Mengisi Alamat Pelapor
5. Mengisi Isi Laporan
6. Menyertakan Email Pelapor
7. Mengisi Kontak/Nomor HP Pelapor

8. Mengupload Data Scan/Foto Kartu Identitas Pelapor

9. Kemudian Klik LAPORKAN

Gambar 3.8

Web Pengaduan ke Dinas Pariwisata

Sumber :
<https://dispar.pesisirbaratkab.go.id/>

Tata cara pengaduan ke Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat melalui website :

1. Masuk ke <https://dispar.pesisirbaratka.b.go.id/>
2. Klik Kirim Pengaduan/Daftar Pengaduan
3. Pilih Klasifikasi Laporan
 - a. Pengaduan
 - b. Aspirasi
 - c. Permintaan Informasi
4. Ketik Judul Laporan
5. Ketik Isi Laporan
6. Pilih Tanggal Kejadian
7. Ketik Lokasi Kejadian
8. Klik Instansi Tujuan
9. Pilih Kategori Laporan
 - a. Agama
 - b. Corona Virus
 - c. Ekonomi dan Keuangan
 - d. Kesehatan
 - e. Kesetaraan Gender dan Sosial Inklus
 - f. Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - g. Dan Lainnya
10. Upload Lampiran
11. Pilih Anonim atau Rahasia
12. Klik LAPOR

6. *Distributive*

Accountability/Responsibility

Dinas Pariwisata tentunya memiliki program untuk menunjang proses *Distributive Accountability/Responsibility*.

Program Dinas Pariwisata tersebut meliputi 4 bidang yaitu Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan SDM Pariwisata dan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata yang kesemuanya di pertanggungjawabkan kepada Bupati. Program ini dilakukan sepanjang tahun dan di tekankan pada saat kegiatan-kegiatan pariwisata yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Salah satu contoh yaitu Pemasaran Pariwisata dengan promosi dan bekerjasama dengan jasa tripwisata.

Paket Trip Pulau ...
tripwisatalampung.com



**Hai, Travelers.
Welcome to**



Anda sedang mencari Paket Wisata Terbaik di Kota Lampung ? Kami adalah Jawabannya. Trip Wisata Lampung akan memberikan anda pengalaman seru dan tak terlupakan saat menggunakan layanan kami. Jadi tunggu apa lagi. Hubungi kami sekarang 

**Paket Trip "Private
2day 1night Pulau
Pisang Lampung
Barat"**

**Meeting point di
Dermaga Tambakak
Krui**

- 2 orang 1.000.000/orang
- 3 orang 900.000/orang
- 4 orang 800.000/orang
- 5 orang 750.000/orang
- 6 orang 700.000/orang
- 6-10 orang 600.000/orang
- 10-50 orang 500.000/orang
- 50-100 orang 400.000/orang

(Biyaya dapat berubah sesuai permintaan/request dari client)

Fasilitas

- kapal penyebrangan pp pulau pisang
- homestay tepi pantai
- makan 3X (prasmanan)
- air mineral selama trip
- berbeque fish
- parkir kendaraan (free aman)
- ticket masuk pulau

Itinerary

DAY 1

- pukul 12:00-12:30 tiba di dermaga tambakak
- pukul 12:30-13:30 perjalanan menuju pulau pisang Dengan kapal laut
- pukul 13:30-14:00 tiba di pulau pisang (check-in homestay)
- pukul 14:00-15:00 makan siang tepi pantai
- pukul 15:00-16:30 jelajah pulau pisang
- pukul 16:30-17:40 hunting sunseth pulau pisang
- pukul 19-00-20:00 makan malam+-berbeque fish di tepi pantai
- pukul 21:00-22:30 istirahat (acara bebas)

DAY 2

- pukul 06:00-07:00 bangun pagi,minum teh/cofee
- pukul 07:00-08:00 sarapan pagi
- pukul 08:00-10:00 acara bebas di pantai (mandi,photo photo dll)
- pukul 10:00-11:00 persiapan checkout dari pulau pisang
- pukul 11:00-11:30 kembali ke dermaga tambakak (tempat stay awal)
- pukul 11:30-12:00 tiba di dermaga tambakak

Trip selesai---

(itinerary dapat berubah sesuai waktu dan kondisi selama trip berlangsung)

Tata cara melakukan trip ke Pulau Pisang dengan website Trip Wisata Lampung :

1. Masuk ke web <https://tripwisatalampung.com/paket-trip-wisata-pulau-pisang-lampung-barat/>

2. Tersedia paket wisata “Private 2day 1night Pulau Pisang Lampung Barat”

3. Menghubungi Pihak Penyedia Trip Melalui WA/Nomer HP

4. Setelah itu, akan dilakukan Meeting Point di Dermaga Tembakak Krui dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- a. 2 orang 1.000.000/orang
- b. 3 orang 900.000/orang
- c. 4 orang 800.000/orang
- d. 5 orang 750.000/orang
- e. 6 orang 700.000/orang
- f. 6-10 orang
600.000/orang
- g. 10-50 orang
500.000/orang
- h. 50-100 orang
400.000/orang

(biaya dapat berubah sesuai dengan permintaan dari wisatawan/client).

5. Fasilitas
Fasilitas yang didapat kan oleh wisatawan yaitu :

- a. Kapal penyebrangan PP Pulau Pisang
- b. Homestay tepi pantai
- c. Makan 3 kali (prasmanan)
- d. Air mineral selama trip
- e. Berbeque fish
- f. Parkir kendaraan (free)
- g. Ticket masuk Pulau

6. Itinerary

a. Day 1

- Pukul 12.00-12.30 tiba di dermaga tembakak
- Pukul 12.30-13.30 perjalanan menuju Pulau Pisang dengan kapal laut
- Pukul 13.30-14.00 tiba di Pulau Pisang (check-in homestay)
- Pukul 14.00-15.00 makan siang tepi pantai
- Pukul 15.00-16.30 jelajah Pulau Pisang
- Pukul 16.30-17.40 hunting sunset Pulau Pisang
- Pukul 19.00-20.00 makan malam dan barbeque ikan di tepi pantai

- Pukul 21.00-22.30 istirahat (acara bebas)
- b. Day 2
 - Pukul 06.00-07.00 bangun pagi, minum the/kopi
 - Pukul 07.00-08.00 sarapan pagi
 - Pukul 08.00-10.00 acara bebas dipantai (mandi,foto,dll)
 - Pukul 10.00-11.00 persiapan check-out dari Pulau Pisang
 - Pukul 11.00-11.30 kembali ke dermaga tembakak
 - Pukul 11.30-12.00 tiba di dermaga tembakak.

7. *Information Sharing*

Pembagian informasi yang jelas antar elemen juga berpengaruh terhadap proses pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat. Komunikasi berjalan secara informal baik itu satu arah maupun dua arah dalam hal promosi media sosial. Pihak pemerintah membuat konten untuk kemudian di manfaatkan oleh pengelola dengan cara

repost atau permintaan langsung melalui whatsapp. Apabila kegiatan promosi dilaksanakan dalam bentuk event maka pengelola diundang untuk kemudian terlibat langsung dalam event tersebut. Untuk event dikarenakan Dinas Pariwisata terakhir kali mengadakan pada tahun 2018 maka komunikasi yang terjalin terhenti sementara. Namun menurut Dinas Pariwisata event wisata akan kembali diadakan di tahun 2022. Pertukaran informasi di media sosial antar elemen dengan cara repost ulang informasi. Luasnya jangkauan promosi dan *exposure* konten promosi terkait.

8. *Access to Resources*

Akses terhadap sumberdaya merupakan kriteria terakhir yang harus ada dalam proses kolaborasi dan pengembangan pariwisata. Pembangunan infrastruktur di laksanakan oleh pemerintah melalui APBD. Pihak swasta membantu melalui pemberian *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pembangunan

infrastruktur tersebut berdasarkan usulan dari Musrembang. CSR di berikan oleh pihak swasta melalui surat Penyampaian Rencana Program CSR.

F. PENUTUP

Kesimpulan

Collaborative Governance merupakan sebuah cara yang dapat dilakukan sebagai alternatif pembangunan jaringan kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga elemen tersebut memiliki peran masing-masing, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan perizinan, swasta sebagai investor, dan masyarakat sebagai penyedia sumberdaya dan pelaksana kebijakan.

Beberapa kriteria keberhasilan *collaborative governance* yang tanpa disadari sudah dipenuhi dan dilakukan oleh pemerintah yaitu *governance* atau pemisahan elemen yang wajib dan tambahan dalam proses kolaborasi, dalam hal sinkronisasi kriteria keberhasilan dengan proses pengembangan pariwisata yang sudah ada maka *governance* dapat dikatakan sudah

diterapkan oleh pemerintah, hal ini dibuktikan dengan pemerintah memasukkan pihak media sosial Instagram seperti @lampunggeh, @potretlampung, sebagai *partner* kerjasama promosi wisata. Kriteria selanjutnya yang sudah diterapkan pemerintah yaitu *access to authority* atau akses terhadap kekuasaan juga telah berhasil dalam pengembangan pariwisata dimana pemerintah memberikan akses kepada swasta dan masyarakat dengan membuat website pengaduan melalui <https://pesisirbaratkab.go.id> dan <https://disparpesisirbaratkab.go.id>, dan masyarakat dapat juga menyampaikan aduan melalui RKJP pekon/desa. Kemudian kriteria lainnya yaitu *information sharing* atau pembagian informasi yang jelas, hal ini dibuktikan dengan kemudahan pengaksesan informasi terkait pariwisata meliputi destinasi wisata, hotel, villa dan rumah makan yang bisa diakses wisatawan melalui akun Instagram resmi dinas pariwisata (@kruitourism), hal ini membuat pelaku usaha dan masyarakat saling berhubungan dan berbagi informasi.

Saran

Pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam pengembangan pariwisata tentunya tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, namun dapat menguntungkan berbagai pihak termasuk swasta atau pelaku usaha pariwisata dan masyarakat sekitar objek wisata. Meskipun demikian dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat khususnya Pulau Pisang masih kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat masih belum terlaksana.

Meskipun belum diadanyakannya kolaborasi secara hukum oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, namun dalam proses pengembangan pariwisata selama ini sudah memasukkan unsur-unsur kriteria keberhasilan dalam sebuah kolaborasi. Diharapkan desain yang diteliti penulis yaitu *collaborative governance* dapat menjadi gambaran untuk memulai kolaborasi antar elemen dalam pengembangan pariwisata khususnya ekowisata bahari di Pulau Pisang.

Penelitian yang dilakukan penulis tentunya masih banyak kekurangan dan ketidaktepatan dalam menguraikan data dan

lainnya, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan penelitian dan mengembangkan desain *collaborative governance* bukan hanya dalam pengembangan pariwisata namun juga pada sektor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Diani, R. M., & Simbolon, Y. K. G. (2017). Analisis Penerapan *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Pariwisata Bencana Lava Tour. *Forum Ilmu Sosial*, 44(1), 43–54. <https://doi.org/10.15294/fis.v44i1.9858>
- Ferdian, K. J., DM, I. A. I., & Tondo, S. (2019). Dampak Ekowisata Bahari Dalam Perspektif Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan Pesisir. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*, 3(1).
- Irawan, D. (2017). *Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya)*. *IR-Perpustakaan Universitas Airlangga*, 5, 1–12.

- Labolo, M. (2005). *Memahami Ilmu Pemerintahan* (ke 2). PT RajaGrafindo Persada.
- Lazuardi, I., Subardjo, P., & Hariyadi. (2013). Analisis Kesesuaian Perairan Untuk Wisata Snorkeling dan Diving Di Pulau Pisang Bagian Utara Kecamatan Pesisir Utara Lampung Barat. *Journal Of Marine Research*, 2(3).
- Manaf, A. (2016). Good Governance dan Pelayanan Publik. *Modul Materi Good Governance Dan Pelayanan Publik*, 1, 58. <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-good-governance-aclc-kpk.pdf>
- Pisang, Kabupaten Pesisir Barat. *Jurnal Sylva Lestari*, 7(2), 225–234.
- Nasution, R. H., Avenzora, R., & Sunarminto, T. (2018). The Analysis of Ecotourism Laws and Policies in Indonesia. *Media Konservasi*, 23(1), 9–17. <https://doi.org/10.29243/medkon.23.1.9-17>
- Setiyono, B. (2014). *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik* (ke 1). CAPS.
- Sofiyan, A., Winarno, G. D., & Hidayat, W. (2019). Analisis Daya Dukung Fisik, Riil dan Efektif Ekowisata di Pulau